

Judul : Capaian Laba Perusahaan Pelat Merah 2017 Diprediksi Meningkat : Setoran Dividen BUMN Dinaikin Jadi Rp 41 Triliun

Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 15

Capaian Laba Perusahaan Pelat Merah 2017 Diprediksi Meningkat

Setoran Dividen BUMN Dinaikin Jadi Rp 41 Triliun

Capaian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2017 diperkirakan naik signifikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan kondisi ekonomi global. Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah berencana menaikkan setoran dividen BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 41 triliun.

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno saat rapat pembahasan anggaran BUMN dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan, nilai tersebut bertambah Rp 3 triliun dari usulan awal setoran dividen BUMN sebesar Rp 38 triliun.

Dijelaskan Menkeu, kenaikan dividen itu sudah memperhatikan tingkat solvabilitas berdasarkan rasio keuangan yang penting, seperti debt to equity ratio (DER), capital adequacy ratio (CAR), asset to liability ratio (ALR), risk based capital (RBC), dan gearing ratio perusahaan-perusahaan BUMN saat ini.

"Kemampuan BUMN juga kita pertimbangkan. Karena saat ini banyak BUMN yang melakukan investasi besar dengan melepas saham ke publik.

Diusahakan, kenaikan ini tidak menurunkan nilai pasar BUMN yang terbuka (Tbk)," kata Sri Mulyani.

Ia merinci, dari total Rp 41 triliun dividen yang diincar dari BUMN, dibagi lagi menjadi beberapa kelas yang antara lain dividen BUMN nonterbuka (Tbk) sebesar Rp 21,46 triliun dan dividen BUMN Tbk Rp 19,6 triliun. Sementara untuk BUMN perbankan ditargetkan menyedot dividen Rp 30,5 triliun dan sisanya oleh BUMN non perbankan. Selain menyedot dividen, BUMN juga diproyeksikan menyedot pajak Rp 180 triliun tahun depan.

Menkeu menjelaskan, secara umum dividen payout ratio diusulkan lebih rendah agar memperoleh tambahan modal melalui retained earnings yang lebih besar termasuk meningkatkan likuiditas.

Setoran BUMN Ke Negara Masih Minim

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, dengan kondisi bisnis BUMN dan aset yang sangat besar (mencapai Rp 5.000 triliun), seharusnya BUMN bisa menyumbang dividen yang signifikan.

"Sayangnya, sekarang banyak bisnis BUMN yang dijalankan anak usaha yang mereka bentuk, sementara anak usaha ini tidak ada kewajiban bayar dividen. Akhirnya, pendapatan negara yang disetor BUMN lewat dividen kecil sekali, nggak sampai Rp 100 triliun," kata Heri kepada *Rakyat Merdeka*.

Ia juga mengkritisi pengelolaan BUMN yang mengejar sisi bisnis semata dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, pendirian BUMN didasarkan kepada Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai UU No. 19 Tahun 2003, BUMN itu punya tanggung jawab sebagai lokomotif pembangunan perekonomian nasional.

"Sayangnya, aksi-aksi korporasi BUMN selama ini justru merugikan kepentingan rakyat banyak. Dari tukar guling saham sampai penjualan atau pengalihan

aset-aset perusahaan," tuturnya.

Tidak sedikit juga BUMN yang masih dikelola dengan tidak efisien dan tidak transparan. Akibatnya, meski sudah diberi Penyertaan Modal Negara (PMN), setoran dividennya tidak mengalami kenaikan, bahkan ada yang masih merugi. "Kalau kita bandingkan, nggak imbang PMN sama dividennya. PMN besar, sementara dividen cuma naik sedikit. Akhirnya impas, sama-saja setoran BUMN ke negara minim," tegas Heri.

Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengingatkan agar pemberian suntikan dana PMN harus diikuti dengan peningkatan kinerja operasional dan keuangan BUMN itu sendiri. Ia tidak ingin kasus PT Merpati terjadi pada BUMN yang meminta PMN. Beberapa tahun silam, Merpati terus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah untuk bisnisnya.

Namun, kata Jhony, suntikan dana tidak diikuti oleh perbaikan kinerja manajemen. "Kalau terus diinjeksi tetapi tidak ada perbaikan dari sisi kinerja manajemen, maka akan terus minta PMN ke negara," ujar Jhony.

Direktur Institute for De-

velopment of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta Kementerian BUMN lebih meningkatkan perannya dalam membina dan mengawasi BUMN dalam pengembangan bisnisnya. Melalui langkah tersebut, laba BUMN dan setoran dividen BUMN diharapkan bisa meningkat.

"Kontribusi dividen dari perolehan laba BUMN untuk pendapatan negara mutlak harus ditingkatkan, saat ini kontribusinya sangat kecil. BUMN sebagai entitas usaha milik negara harus efisien, terutama untuk BUMN yang masih rugi harus ditingkatkan kinerjanya. Ini PR Menteri Rini," kata Enny kepada *Rakyat Merdeka*.

Menurutnya, optimalisasi kinerja BUMN harusnya jadi opsi lain selain penerimaan pajak. Perusahaan BUMN juga harus dapat bersaing dengan perusahaan swasta di setiap sektor.

"Jika perusahaan swasta lain di sektor tertentu tumbuh 10 persen, BUMN itu di sektor yang sama juga harus tumbuh mendekati itu. Selama ini kan tidak, lebih banyak BUMN kalah sama swasta," tandasnya. ■ NOV